

SIARAN PERS

BAWASLU LAMPUNG BERKOMITMEN PERKUAT PENGAWASAN PARTISIPATIF DI MASA NON TAHAPAN

BANDAR LAMPUNG, 10 Juni 2025 - Tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Provinsi Lampung telah berakhir. Para pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih telah dilantik dan mulai menjalankan amanah rakyat di berbagai Kabupaten dan Kota hingga Provinsi. Meski demikian sampai saat ini masih terdapat 1 dari 15 daerah di Lampung yang berproses penyelesaian sengketa pemilihan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) yakni Kabupaten Pesawaran atas hasil Pemungutan Suara Ulang 24 Mei 2025. Di tengah berakhirnya tahapan pemilu dan pilkada ini, muncul pertanyaan dari publik: "Apa kerja Bawaslu setelah tahapan selesai?"

Menjawab hal tersebut, Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Iskardo P. Panggar, menegaskan bahwa meskipun tahapan pemilu atau pilkada telah berakhir, Bawaslu tetap menjalankan tugas dan fungsinya secara konstitusional sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Terdapat sejumlah tugas non-tahapan yang tetap harus dilaksanakan Bawaslu dalam menjaga marwah demokrasi.

Dalam pasal 96, 100, dan 104, disebutkan bahwa Bawaslu tetap memiliki mandat konstitusional untuk mengawasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang dilaksanakan oleh KPU di semua jenjang. Selain itu, pada pasal 94, 98, 102, dan 105 dalam Undang-Undang Pemilu, Bawaslu juga diberikan kewenangan untuk terus meningkatkan dan mengembangkan pengawasan partisipatif, baik di masa tahapan maupun non tahapan pemilu.



Merujuk Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif, disebutkan bahwa pengawasan partisipatif dilaksanakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, melalui berbagai program seperti Pendidikan Pengawas Partisipatif, Forum Warga, Pojok Pengawasan, kerja sama dengan perguruan tinggi, Kampung Pengawasan, dan Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif.

Iskardo P. Panggar menyampaikan bahwa meski tahapan sudah selesai dan anggaran terbatas, Bawaslu tetap harus eksis menjalankan tugas dan fungsinya. “Bawaslu Kabupaten/Kota di instruksikan melalui Surat Instruksi Bawaslu Provinsi Lampung Nomor 4/PM.03/LA/05/2025 tanggal 28 Mei 2025 untuk tetap melaksanakan kegiatan pengawasan partisipatif yang bersifat non-budgeter. Ini penting agar eksistensi lembaga tetap terjaga dan proses pendidikan demokrasi terus berjalan,” ujar Iskardo.

Selain itu, Dalam upaya memperkuat sinergi antar lembaga dan membangun komunikasi yang lebih solid di lingkungan pengawasan pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung tengah mempersiapkan sebuah program olahraga bertajuk “Demokrasi Sehat”. Program ini menjadikan olahraga, khususnya bulu tangkis melalui wadah PB BALUNG, sebagai sarana utama mempererat silaturahmi, baik di internal Bawaslu maupun dengan institusi eksternal atau lembaga lainnya juga berkenaan dengan persepsi serta curah pendapat arah demokrasi di Lampung yang akan datang. Selain bulu tangkis, Bawaslu Lampung juga membentuk tim mini soccer dan futsal sebagai bagian dari program tersebut.



Kemudian Ia menegaskan bahwa kegiatan pengawasan partisipatif minimal dilakukan dua kali dalam sebulan. Salah satu sasarannya adalah calon pemilih pemula seperti siswa SLTA sederajat atau mahasiswa, menyesuaikan dengan ketersediaan pihak sekolah atau kampus.

Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Provinsi Lampung, Hamid Badrul Munir turut menegaskan bahwa meskipun keterbatasan anggaran, pengawas pemilu harus tetap menjalankan tugas. “Kita menjalankan fungsi

pengawasan, meski tanpa anggaran, kegiatan pengawasan partisipatif harus tetap dijalankan sebagai bentuk tanggung jawab kelembagaan,” ujarnya.

HBM menilai bahwa kegiatan pengawasan partisipatif bersifat fleksibel dan tidak membutuhkan sumber daya yang besar. Kegiatan cukup dilakukan melalui kerja sama dengan sekolah atau kampus terdekat, dengan pendekatan yang kreatif dari masing-masing Bawaslu Kabupaten/Kota.

“Bawaslu harus menunjukkan eksistensinya. Kita bisa mulai dari lingkungan yang memang ada di sekitar kita, tidak perlu muluk-muluk. Yang penting kegiatan ini berjalan, terdokumentasi dengan baik, dan punya dampak terhadap pendidikan demokrasi di masyarakat,” tambahnya.

Ia juga mendorong agar Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki target konkret terkait pendidikan politik di SMA/SLTA sederajat, termasuk menjalin sinergi dengan instansi/lembaga di daerah masing-masing.

“Kegiatan ini kalau bisa dilakukan secara serentak di seluruh Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung, sehingga bisa diluncurkan bersama-sama dan dipublikasikan secara luas ke masyarakat,” pungkasnya.



Dengan semangat kolaboratif dan efisiensi, Bawaslu Lampung terus mendorong agar pengawasan partisipatif tidak hanya menjadi kegiatan formalitas, tetapi benar-benar menyentuh akar partisipasi masyarakat dan memperkuat demokrasi di masa non-tahapan.

KETUA BAWASLU PROVINSI LAMPUNG

(ttd)

ISKARDO P.PANGGAR, S.H.,M.H.

Narahubung
Nama : Hamid Badrul Munir, S.H.I.
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Lampung
(Koordiv Pencegahan dan Parmas)
No HP/ Wa : 0812 7207 7011



lampung.bawaslu.go.id



bawaslulampung

**REKAPITULASI KEGIATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA BULAN JUNI
BAWASLU SE-PROVINSI LAMPUNG**

PROVINSI/KAB/KOTA	BULAN JUNI	KEGIATAN
Bawaslu Provinsi Lampung	2	1. Diskusi dan Bedah Buku pada pengembangan Pojok Pengawasan; dan 2. Koordinasi dengan Stakeholders
Bawaslu Kota Bandar Lampung	2	1. Kerjasama dengan Perguruan Tinggi; dan 2. Sosialisasi Pengawas Partisipatif ke Partai-partai
Bawaslu Kota Metro	2	1. Kerjasama dengan Perguruan Tinggi; dan 2. Sosialisasi ke pemilih pemula sekolah SMA/SLTA
Bawaslu Kab. Pesawaran	1	Sosialisasi Pengawas Partisipatif ke Ormas dan OKP
Bawaslu Kab. Pringsewu	1	Podcast pada pengembangan pojok pengawasan
Bawaslu Kab. Tanggamus	2	1. Kerjasama dengan Stakeholder; dan 2. Sosialisasi Pengawas Partisipatif pada kegiatan Jambore Saka Adhyasta
Bawaslu Kab. Pesisir Barat	2	Sosialisasi ke pemilih pemula sekolah SMA/SLTA
Bawaslu Kab. Lampung Timur	1	Forum Warga kepada PKK/Posyandu
Bawaslu Kab. Lampung Selatan	2	1. Diskusi publik pada pengembangan Pojok Pengawasan; dan 2. Forum Warga kepada Nelayan
Bawaslu Kab. Lampung Tengah	1	Sosialisasi ke pemilih pemula sekolah SMA/SLTA
Bawaslu Kab. Lampung Utara	1	Sosialisasi ke pemilih pemula sekolah SMA/SLTA
Bawaslu Kab. Lampung Barat	1	Sosialisasi ke pemilih pemula sekolah SMA/SLTA
Bawaslu Kab. Way Kanan	1	Sosialisasi ke pemilih pemula sekolah SMA/SLTA
Bawaslu Kab. Tulang Bawang	1	Sosialisasi ke pemilih pemula sekolah SMA/SLTA
Bawaslu Kab. Tulang Bawang Barat	1	Sosialisasi ke pemilih pemula sekolah SMA/SLTA
Bawaslu Kab. Mesuji	1	Sosialisasi ke pemilih pemula sekolah SMA/SLTA

